

Nama Rumpun Ilmu: Akuntansi

HASIL PENELITIAN UNGGULAN PRODI



**ANALISIS PENGARUH KARAKTERISTIK PERUSAHAAN DAN FAKTOR
REGULASI TERHADAP KUALITAS IMPLEMENTASI *CORPORATE*
*GOVERNANCE***

TIM PENGUSUL

**Barbara Gunawan, S.E., M.Si., Ak., C.A. (0519097101/19710919199603143050)
Fitri Wahyuni, S.E. (201208)**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
Januari 2017**

**HALAMAN PENGESAHAN
HASIL PENELITIAN UNGGULAN PRODI**

Judul Penelitian : Analisis Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Faktor
Regulasi terhadap Kualitas Implementasi *Corporate Governance*

Nama Rumpun Ilmu : Akuntansi

Ketua Peneliti:

a. Nama Lengkap : Barbara Gunawan, S.E., M.Si., Ak., C.A.
b. NIDN/NIK : 0519097101/19710919199603143050
c. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
d. Program Studi : Akuntansi
e. Nomor HP : 085228004245
f. Alamat surel (e-mail) : barbaragunawan@yahoo.co.id

Anggota Peneliti

a. Nama Lengkap : Fitri Wahyuni, S.E.
b. NIDN /NIK : 201208
c. Jabatan Fungsional : -
d. Program Studi : Akuntansi

Biaya Penelitian : Rp. 30.000.000

Yogyakarta, 5 April 2017
Ketua Peneliti,

Menyetujui,
Ketua Jurusan Akuntansi

(Dr. Jetje Nazaruddin, M.Si., Ak., C.A.)
19650715199303143025

(Barbara Gunawan, S.E., M.Si., Ak., C.A.)
19710919199603143050

Menyetujui,
Ketua LP3M UMY

(Hilman Latief, S. Ag., M. A., Ph. D.)
19750912200004113033

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi

(Dr. Nano Prawoto, M.Si)
19660604199202143016

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh karakteristik perusahaan (kesempatan investasi, konsentrasi kepemilikan, *leverage*, ukuran dewan direksi, ukuran perusahaan) dan Faktor Regulasi terhadap Kualitas Implementasi *Corporate Governance* pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2010-2014.

Menggunakan 78 sampel perusahaan yang masuk dalam peringkat sepuluh besar *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) yang terdaftar BEI yang dipilih dengan metode *purposive sampling* dan alat analisis regresi linier berganda, hasilnya menunjukkan bahwa ukuran dewan direksi, jenis industri Bank dan Non Bank, dan kategori perusahaan BUMN dan Non BUMN berpengaruh signifikan terhadap kualitas *corporate governance*. Sementara itu, kesempatan investasi, konsentrasi kepemilikan, *leverage*, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas *corporate governance*.

Kata kunci: kualitas *corporate governance*, kesempatan investasi, konsentrasi kepemilikan, *leverage*, ukuran dewan direksi, ukuran perusahaan, faktor regulasi.

A. Latar Belakang Penelitian

Isu *corporate governance* timbul karena adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian yang dapat menimbulkan konflik kepentingan di antara pihak-pihak tertentu. Pada tahun 1950an sebenarnya isu *corporate governance* mulai hangat diperbincangkan akibat dari mencuatnya skandal bisnis yang terjadi di Inggris, karena lemahnya *corporate governance* perusahaan-perusahaan di Negara tersebut. Di Indonesia, isu mengenai *corporate governance* mulai merebak sejak tahun 1998 disaat Indonesia mengalami krisis moneter yang diakibatkan oleh kurangnya penerapan *corporate governance*.

Corporate governance adalah tata kelola perusahaan yang terdiri dari manajemen, direksi, dewan komisaris, pemegang saham, dan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) lainnya yang mengatur kegiatan perusahaan. *Corporate governance* merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara pihak manajemen (*principal*) dengan pihak agen tentang pengelolaan perusahaan (Rahayuningsih, 2013). Menurut *The Indonesian Institute of Corporation Corporate Governance* (IICG) (2000);

“...*corporate governance* adalah struktur dan proses yang diterapkan untuk menjalankan perusahaan yang tujuan utamanya untuk meningkatkan nilai pemegang saham jangka panjang namun tetap memperhatikan kepentingan *stakeholdernya*.”

Bank dunia dan *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) sudah memberikan masukan atau kontribusi yang besar dalam mengembangkan prinsip-prinsip *corporate governance* di berbagai Negara, termasuk Indonesia didalamnya. Sebagian besar negara (termasuk

Indonesia) sudah mempunyai lembaga/badan/institusi yang membentuk prinsip-prinsip *corporate governance* yang sesuai dengan kondisi lingkungan bisnis di Negara yang bersangkutan. Di Indonesia, pemeringkatan penerapan *corporate governance* telah dilakukan oleh *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG) secara kontinyu setiap tahun sejak tahun 2001 dengan nama *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) dalam perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Perusahaan yang masuk dalam daftar peringkat sepuluh besar CGPI adalah perusahaan yang mempunyai kualitas *corporate governance* yang baik di Indonesia, keberadaan perusahaan yang masuk dalam daftar peringkat sepuluh besar tersebut memiliki ketertarikan tersendiri yang dapat menarik bagi investor dan kreditor. Hal tersebut disebabkan oleh kualitas implementasi *corporate governance* yang baik yang telah mampu meningkatkan perusahaan melalui kinerja dan tingkat pertumbuhan perusahaan yang terus menerus membaik sehingga dapat menyamarkan kecurigaan dari pihak luar. *Good Corporate Governance* (GCG) bisa memberi jaminan kepada perusahaan dalam keadaan yang *sustainable* (terpelihara) dari iklim bisnis yang tidak sehat (Swa Sembada dalam Taman dan Nugroho, 2011).

Beberapa hal yang menjadi perhatian utama dalam konsep *corporate governance* adalah pentingnya pemegang saham memperoleh informasi dengan akurat, tepat waktu serta kewajiban perusahaan untuk mengungkapkan secara transparan mengenai semua hal yang berkenaan dengan kepemilikan, pemegang kepentingan (*stakeholder*) dan kinerja keuangan (Evana *et al.*, 2015).

Selain untuk mendorong penerapan *corporate governance* dan dalam rangka meningkatkan kualitas keterbukaan informasi keuangan, beberapa institusi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam), PT. Bursa Efek Indonesia, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dan Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (KNKCG) memberikan penghargaan kepada perusahaan-perusahaan yang *go public* dalam keterbukaannya mengenai laporan keuangan tahunannya dibanding dengan perusahaan lainnya (Warta Ekonomi, 2002 dalam Achyani, 2016).

Beberapa penelitian telah menemukan hubungan antara *corporate governance* dengan kinerja perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Black *et al.* (2006), Klapper dan Love (2004), dan Darmawati (2006) menemukan bahwa adanya hubungan positif antara *corporate governance* dengan kinerja perusahaan. Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan kegunaan pemeringkatan dari praktik *corporate governance* di perusahaan yang dilakukan di berbagai negara termasuk Indonesia. Karena masalah keagenan beragam antar perusahaan, biaya dan manfaat bersih dari alternatif struktur *corporate governance* yang digunakan dalam pengendalian masalah-masalah keagenan juga beragam. Keberagaman biaya dan manfaat dari implementasi *corporate governance* begitu ditentukan oleh situasi lingkungan perusahaan, industri maupun regulasi (Darmawati, 2006).

Peneliti-peneliti terdahulu telah berhasil menemukan determinan dari implementasi *corporate governance* di tingkat perusahaan. Gillan *et al.* (2003)

dalam Darmawati (2006) menemukan bahwa variasi struktur *governance* dipengaruhi oleh faktor-faktor perusahaan dan industri.

Konsentrasi kepemilikan dalam sebuah perusahaan dapat memengaruhi implementasi taktik organisasi jika mayoritas modal perusahaan bersumber dari saham atau surat berharga, sehingga dapat memengaruhi kualitas implementasi *corporate governance* pada perusahaan yang dirancang oleh para pemegang saham pengendali perusahaan melalui kebijakan yang diterapkan (Taman dan Nugroho, 2011).

Durnev dan Kim (2003) menemukan bahwa perusahaan yang mempunyai kesempatan investasi yang tinggi, kebutuhan eksternal yang tinggi pula, dan struktur kepemilikan konsentrasinya hak-hak kepada aliran kas perusahaan yang menerapkan praktik *corporate governance* yang mempunyai kualitas tinggi.

Struktur modal (*leverage*) yang digunakan dalam perusahaan juga dapat memengaruhi kualitas implementasi *corporate governance* dalam perusahaan. Black *et al.* (2006) menyimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat utang dalam struktur modal perusahaan, maka perusahaan akan semakin diawasi oleh pihak kreditor karena adanya kontrak utang yang dibuat. Dengan adanya hal tersebut, perusahaan akan cenderung kurang memperhatikan kualitas *corporate governance* dikarenakan adanya pengawasan dari pihak luar. Jika perusahaan memiliki komposisi struktur modal saham yang lebih besar, maka pemegang saham mempunyai kuasa yang besar untuk memaksa perusahaan untuk lebih meningkatkan kualitas implementasi *corporate governance*-nya. Namun pada

perusahaan tertentu, komposisi utang dalam struktur modal perusahaan mempunyai tingkat pengaruh yang rendah terhadap kualitas implementasi *corporate governance*.

Sesuai UU No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (PT) struktur *corporate governance* dimana Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah badan tertinggi yang terdiri atas pemegang saham yang memiliki hak untuk memilih dewan komisaris dan dewan direksi (Wulandari, 2006). Secara teoritis Allen dan Gale (2000) dalam S. Bainer *et al.* (2003), menegaskan bahwa direktur merupakan indikator yang paling penting karena dapat memastikan bahwa manajer mengikuti kepentingan anggota dewan.

Di Indonesia, sistem hukum dan regulasi menjadi tantangan yang harus ditangani guna meningkatkan kualitas budaya dan praktik-praktik bisnis (Darmawati, 2006). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Durnev dan Kim (2003) dalam Darmawati (2006), menunjukkan bahwa 27 negara-negara di Asia, Indonesia memiliki sistem hukum yang paling rendah dalam memproteksi investor.

Berdasarkan uraian tersebut, penting untuk mencermati penerapan *corporate governance* dalam perusahaan sehingga diharapkan perusahaan dapat menerapkan atau mengimplementasikan *corporate governance* dengan baik. Penelitian mereplikasi Darmawati (2006), dengan beberapa modifikasi diantaranya tahun penelitian yang lebih panjang dan adanya tambahan satu variabel yaitu ukuran dewan direksi (*board size*).

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh karakteristik perusahaan (kualitas *corporate governance*, kesempatan investasi, konsentrasi kepemilikan, *leverage*, ukuran dewan direksi, ukuran perusahaan) dan faktor regulasi terhadap kualitas implementasi *Corporate Governance*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah kesempatan investasi, kepemilikan, *Leverage*, dan ukuran dewan direksi berpengaruh terhadap kualitas implementasi *corporate governance*?
2. Apakah jenis industri berpengaruh terhadap kualitas implementasi *corporate governance*?

C. Kontribusi Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi sebagai referensi dalam topik yang berhubungan dengan kualitas implementasi *corporate governance*. Bagi perusahaan diharapkan dapat dijadikan motivasi dalam penerapan *good corporate governance* dan pengambilan kebijakan.

D. Landasan Teori

1. Teori Keagenan

Teori keagenan sering digunakan sebagai landasan teori dalam penelitian mengenai *corporate governance*. Jensen dan Mecking (1976)

dalam Isditanadevi dan Puspaningsih (2014) menyatakan bahwa munculnya hubungan keagenan disebabkan oleh satu atau lebih individu yang mempekerjakan individu lainnya guna memberikan jasa dan mendelegasikan wewenang kepada agen untuk membuat keputusan.

Menurut Berle dan Means (1932) serta Pratt dan Zeckhauser (1985) dalam Wulandari (2006) bahwa didalam teori agensi, saham yang sepenuhnya dimiliki oleh pemegang saham (pemilik) dan manager, diminta untuk memaksimalkan tingkat pengembalian pemegang saham (*dividen*).

Dalam suatu korporasi pemegang saham adalah *principal* dan *Chief Executive Officer* (CEO) sebagai agen. Salah satu elemen kunci dari teori agensi adalah *principal* dan agen mempunyai preferensi yang berbeda. Manajer berkewajiban memberikan sinyal mengenai kondisi perusahaan, karena manajer selaku pengelola perusahaan mengetahui lebih banyak informasi internal perusahaan dibandingkan pemegang saham. Sinyal yang diberikan melalui pengungkapan informasi akuntansi berupa laporan keuangan. Laporan keuangan sangat penting bagi pengguna informasi eksternal perusahaan, karena ketidakpastian kelompok ini berada pada kondisi yang paling besar (Taman dan Nugroho, 2011).

Dalam hubungannya dengan keagenan, kerap terjadi konflik kepentingan antara agen dan *principal*. Untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan tersebut salah satunya caranya adalah dengan melakukan pengawasan. Sistem pengawasan bertujuan untuk mencegah

masalah keagenan yang muncul antara pihak agen dengan *principal*/pemegang saham sebagai pemilik perusahaan, sistem pengawasan ini dikenal sebagai *corporate governance* (Isditanadevi dan Puspaningsih, 2014).

2. *Corporate Governance*

Sambutan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia yang dijelaskan dalam Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) menyatakan bahwa;

“*Good Corporate Governance* (GCG) adalah satu pilar dari sistem ekonomi pasar. *Corporate governance* berkaitan erat dengan kepercayaan terhadap perusahaan yang melaksanakan maupun terhadap iklim usaha di suatu Negara.”

Lastanti dalam Achyani (2016) menyatakan bahwa *corporate governance* adalah mekanisme pengendalian guna mengelola bisnis dengan tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perusahaan dan mewujudkan nilai pemegang saham.

Menurut *The Indonesian Institute of Corporate Governance* (IICG), *Good Corporate Governance* (GCG) adalah sistem, struktur, dan proses yang digunakan oleh perusahaan untuk memberikan nilai tambah terhadap perusahaan untuk jangka panjang namun tetap memperhatikan kepentingan para *stakeholder*-nya yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (IICG dalam Taman dan Nugroho, 2011). Pada dasarnya, *corporate governance* merupakan hubungan partisipan untuk

menentukan arah dalam kinerja. Oleh sebab itu, penerapan *corporate governance* sangat penting di Indonesia karena dapat menunjang stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkepanjangan.

Tujuan penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) adalah

- a) Mendorong tercapainya hubungan perusahaan melalui pengelolaan yang berdasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, dan independensi;
- b) Mendorong pemberdayaan kemandirian dan fungsi dari Dewan Komisaris, Direksi, dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
- c) Mendorong organ perusahaan untuk menjalankan tindakannya berdasarkan nilai moral yang tinggi dan patuh terhadap perundang-undangan yang berlaku;
- d) Mendorong timbulnya kesadaran perusahaan terhadap kelestarian lingkungan di sekitar perusahaan;
- e) Mengoptimalkan nilai perusahaan bagi para *stakeholder* dan tetap memperhatikan para pemangku kepentingan yang lainnya; dan
- f) Meningkatkan daya saing perusahaan dalam kancah dalam negeri maupun luar negeri, agar dapat meningkatkan kepercayaan pasar sehingga mendorong arus kas investasi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Prinsip-prinsip utama dari *Good Corporate Governance* (GCG) yang menjadi indikator yang telah dirancang oleh *The Indonesian Institute of Corporation Governance* (IICG) dalam Taman dan Nurgoho (2011) dan *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD)

dalam Taman dan Nurgoho (2011) dan dalam Pedoman Umum *Good Corporate Governance Indonesia* yaitu:

a. *Transparansi (Disclosure/Transparency)*

Transparansi adalah pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan secara akurat dan tepat waktu, serta transparan terhadap hal yang penting bagi kinerja perusahaan mengenai kepemilikan, serta pemegang kepentingan. Guna menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditor, dan pemangku kepentingan lainnya.

b. *Akuntabilitas (Accountability)*

Akuntabilitas menekankan pada pentingnya penciptaan sistem pengawasan yang efektif berdasarkan pembagian kekuasaan antara komisaris, direksi, dan pemegang saham yang meliputi monitoring, evaluasi, serta pengendalian terhadap manajemen untuk meyakinkan bahwa manajemen bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham dan pihak-pihak berkepentingan lainnya. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja perusahaan yang berkesinambungan.

c. *Responsibilitas (Responsibility)*

Responsibilitas adalah tanggung jawab pengurus dalam manajemen, pengawasan manajemen, serta pertanggungjawaban kepada perusahaan dan para pemegang saham. Prinsip ini diwujudkan dengan kesadaran tanggung jawab sosial, menghindari penyalahgunaan wewenang kekuasaan, menjadi professional, dan menjunjung etika serta memelihara bisnis yang sehat.

d. *Independensi (Independency)*

Dalam melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing bagian perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak mudah diintervensi oleh pihak lain.

e. *Keadilan (Fairness)*

Keadilan merupakan prinsip yang memperlakukan adil bagi seluruh pemegang saham (*stakeholder*). Keadilan diartikan sebagai perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham, terutama kepada pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing dari kecurangan, dan keasalahan insider. Dalam pelaksanaan kegiatannya, perusahaan harus selalu memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan kewajaran dan kesetaraan.

Munculnya pedoman *Good Corporate Governance (GCG)* yang telah dibuat oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance (KNKG)* yang

selanjutnya dijadikan kode etik oleh perusahaan, sehingga dapat memberikan acuan atau tolak ukur kepada para pelaku usaha untuk melaksanakan GCG secara konsisten dan konsekuen. Hal ini sangat penting, mengingat kecenderungan aktivitas usaha yang semakin mendunia, maka prinsip-prinsip *corporate governance* (keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas) dapat dijadikan sebagai ukuran perusahaan untuk menghasilkan suatu kinerja perusahaan yang lebih baik.

3. Kualitas Implementasi *Corporate Governance*

Kualitas implementasi *corporate governance* merupakan penilaian mengenai tata kelola perusahaan yang dapat diukur dengan menggunakan instrumen pemeringkatan yang dikembangkan oleh IICG (Setyani, 2012). Penilaian CGPI meliputi empat bobot nilai yang berbeda tiap tahunnya (Taman dan Nugroho, 2011), seperti tampak pada Tabel 1.

TABEL 1
PEMBOBOTAN NILAI CGPI

Pembobotan	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014
<i>Self assessment</i>	25%	15%	17%	27%	21%
Kelengkapan dokumen	23%	20%	35%	41%	27%
Penyusunan makalah	17%	14%	13%	14%	25%
Observasi	35%	51%	35%	18%	27%
Total	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Laporan CGPI

E. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian Darmawati (2006), Taman dan Nugroho (2011) dan Rahayuningsih (2013) menemukan bahwa kesempatan investasi tidak berpengaruh terhadap kualitas implementasi *corporate governance*.

Hasil penelitian Taman dan Nugroho (2011), Rahayuningsih (2013), dan Evana *et al.* (2007), menemukan bahwa konsentrasi kepemilikan tidak berpengaruh terhadap kualitas implementasi *corporate governance*; namun hasil tersebut tidak konsisten dengan hasil Darmawati (2006) yang menunjukkan hasil konsentrasi kepemilikan berpengaruh terhadap kualitas implementasi *corporate governance*.

Hasil penelitian mengenai *Leverage* yang dilakukan oleh Taman dan Nugroho (2011), Evana *et al.* (2007) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap kualitas implementasi *corporate governance*; hal ini tidak konsisten dengan Darmawati (2006) dan Rahayuningsih (2013) yang menemukan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap kualitas implementasi *corporate governance*.

Penelitian yang dilakukan oleh Wulandari (2006) mengenai ukuran dewan direksi yang menunjukkan hasil bahwa dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan.

Ukuran perusahaan pernah diteliti oleh Klapper dan Love (2003) dalam Darmawati (2006) dan menyebutkan bahwa hasil dari ukuran perusahaan terhadap kualitas *corporate governance* masih bersifat ambigu. Darmawati (2006) berhasil menemukan hubungan positif antara ukuran

perusahaan dengan kualitas *corporate governance*, sedangkan Rahayuningsih (2013) tidak menemukan pengaruh antara ukuran perusahaan dengan kualitas *corporate governance*.

Jenis industri Bank dan Non Bank yang diteliti oleh Rahayuningsih (2013) menunjukkan bahwa jenis industri Bank dan Non Bank berpengaruh terhadap kualitas *corporate governance*. Namun penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Darmawati (2006) yang menunjukkan bahwa jenis industri Bank dan Non Bank tidak memengaruhi kualitas *corporate governance*.

Kategori perusahaan BUMN dan Non BUMN yang diteliti oleh Darmawati (2006) menemukan adanya pengaruh kategori BUMN dan Non BUMN terhadap kualitas *corporate governance*. Hasil ini bertolak belakang dengan hasil penelitian Rahayuningsing (2013) yang menemukan kategori perusahaan BUMN dan Non BUMN tidak berpengaruh terhadap kualitas *corporate governance*.

F. Hipotesis

1. Kesempatan Investasi (*Investment Oppourtunities*) dan Kualitas *Corporate Governance*

Perusahaan yang mempunyai kesempatan investasi yang tinggi dengan senang hati akan melakukan ekspansi dan membutuhkan dana eksternal yang akan membuat perusahaan meningkatkan kualitas

corporate governance untuk memperoleh dana eksternal yang didapat dan menurunkan biaya modal (Durnev dan Kim, 2003)

Menurut Gillan *et al.* (2003) dalam Darmawati (2006), manajer perusahaan yang memiliki kesempatan investasinya tinggi, akan lebih memiliki kesempatan untuk melakukan ekspropriasi yang besar dalam memilih proyek, dibandingkan dengan manajer yang perusahaannya memiliki kesempatan yang kurang dalam investasinya. Dengan begitu, maka perusahaan yang mempunyai kesempatan investasi yang tinggi akan memerlukan kualitas *corporate governance* yang baik. Jhonshon *et al.* (2000) dalam Darmawati (2006) menemukan manajer di perusahaan-perusahaan yang mengalami penurunan kesempatan investasi cenderung akan melaksanakan ekspropriasi sumber daya pada saat terjadi krisis moneter di wilayah Asia.

Durnev dan Kim (2003) menyatakan bahwa pandangan yang berbeda akan kebutuhan *corporate governance* pada perusahaan yang mempunyai kesempatan investasi yang tinggi. Durnev dan Kim (2003) memaparkan bahwa saat kesempatan investasi lebih menguntungkan, pengembalian dari investasi para pemegang saham akan jauh lebih besar jika dibandingkan saat mereka melakukan diskresi kepada sumber daya perusahaan, sehingga mendorong perusahaan untuk menerapkan *corporate governance* lebih berkualitas.

Darmawati (2006) menemukan bahwa kesempatan investasi tidak berpengaruh terhadap implementasi *corporate governance*. Berdasarkan uraian tersebut, maka dirumuskan hipotesis:

H₁: Kesempatan Investasi berpengaruh terhadap kualitas *corporate governance* perusahaan

2. Konsentrasi Kepemilikan dan Kualitas *Corporate Governance*

Beberapa penelitian telah menemukan adanya korelasi antara konsentrasi kepemilikan dengan kualitas *corporate governance* pada perusahaan. Durnev dan Kim (2003) menyatakan bahwa kualitas *corporate governance* akan meningkat jika kepemilikan yang dimiliki oleh pemegang saham pengendali besar. Jensen dan Meckling (1976) dalam Darmawati (2006) juga menjelaskan bahwa jika manajer yang mempunyai tingkat kepemilikan di perusahaan tersebut tinggi, ada kemungkinan untuk meakukan diskresi/ekspropiasi kepada sumber daya perusahaan akan minim dilakukan.

Black *et al.* (2003) dalam Darmawati (2006) menemukan adanya korelasi yang positif antara kepemilikan pemegang saham mayoritas dengan indeks *corporate governance*. Penelitian lain yang dilakukan oleh Cai *et al.* (2003) dalam Rahayuningsih (2013). Hal ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan Darmawati (2006) yang menemukan bahwa Konsentrasi kepemilikan memiliki pengaruh positif terhadap implementasi *good corporate governance*

Gillan *et al.* (2003) dalam Darmawati (2006) menemukan bahwa jika semakin tinggi kepemilikan manajer dan direksi suatu perusahaan akan diprediksi semakin rendah indeks dewan direksi, sedangkan jika semakin rendah score *governance*-nya maka akan semakin tinggi indeks pertahanan *take over*-nya.

Penelitian yang dilakukan oleh Darmawati (2006) menemukan konsentrasi kepemilikan memiliki hubungan yang positif terhadap kualitas *corporate governance* perusahaan. Hal ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Barucci dan Falini (2004) bahwa kepemilikan saham oleh pemegang saham pengendali berhubungan negatif dengan kualitas *corporate governance*. Berdasarkan uraian tersebut, maka dirumuskan hipotesis:

H₂: Besarnya konsentrasi kepemilikan berpengaruh terhadap kualitas *corporate governance* perusahaan

3. Leverage dan Kualitas Corporate Governance

Menurut Black *et al.* (2003) dalam Darmawati (2006) ada dua alternatif yang dapat menjelaskan hubungan antara struktur modal dengan kualitas *corporate governance* pada perusahaan. Alternatif pertama menjelaskan bahwa jika suatu perusahaan dalam struktur modalnya mempunyai tingkat utang yang tinggi, maka pengawasan yang dilakukan oleh kreditor akan lebih ketat yang dinyatakan dalam kontrak utang. Dengan begitu, perusahaan akan kurang memperhatikan kualitas

corporate governance-nya, dikarenakan sudah adanya pengawasan dari pihak kreditor.

Alternatif kedua menjelaskan bahwa kreditor (pihak eksternal) mempunyai kepentingan dengan praktik *governance* dari debiturnya dan mempunyai kuasa yang besar dibandingkan dengan pemegang saham yang memaksa perusahaan untuk meningkatkan kualitas *corporate governance*-nya.

Black *et al.* (2003) dan Gillan *et al.* (2003) menemukan hubungan negatif antara *leverage* dan kualitas *corporate governance*, sedangkan Durnev dan Kim (2003) menemukan korelasi positif antara pemilihan perusahaan dalam praktik *governance* dan pengungkapan (*voluntary*) berkorelasi secara positif dengan kebutuhan perusahaan akan pendanaan eksternal.

Penelitian yang dilakukan Baruci dan Falini (2004) tidak berhasil menemukan adanya hubungan antara *leverage* dan kualitas *corporate governance*. Penelitian ini konsisten dengan yang dilakukan oleh Darmawati (2006) bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap kualitas *corporate governance*. Berdasarkan uraian tersebut, maka dirumuskan hipotesis:

H₃: *Leverage* berpengaruh terhadap kualitas *corporate governance* perusahaan

4. Ukuran Dewan Direksi dan Kualitas *Corporate Governance*

Dewan direksi merupakan salah satu indikator yang sangat penting dalam pelaksanaan *corporate governance* di perusahaan (Wantoro dan Gunawan, 2013). Istilah dewan direksi (*board of director*) di Amerika mengacu pada fungsi dari dewan komisaris di Indonesia yang mengemban fungsi pengawasan terhadap manajemen, sedangkan untuk istilah dewan direksi di Indonesia lebih mengacu pada fungsi manajemen yang melaksanakan fungsi manajerial dan operasional perusahaan sehari-hari di Amerika (Wignohartojo, 2001).

Dewan direksi merupakan dewan yang bertanggung jawab atas keseluruhan pengelolaan perusahaan jangka panjang (Kusumawati dan Bambang 2005). Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG), salah satu tugas utama dewan direksi yaitu, dewan direksi harus memperhatikan kepentingan yang wajar dari para pemangku kepentingan (*stakeholder*).

Faisal (2005) dalam Purno dan Khafid (2013) menyatakan bahwa ukuran dewan direksi berhubungan positif dengan kinerja perusahaan. Penelitian ini tidak konsisten dengan yang dilakukan Wulandari (2006) bahwa jumlah dewan direktur berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kinerja perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut, maka dirumuskan hipotesis:

H₄: Ukuran dewan direksi berpengaruh terhadap kualitas *corporate governance* perusahaan

5. Ukuran Perusahaan dan Kualitas *Corporate Governance*

Sebagai tambahan dari karakteristik perusahaan yang diduga dapat menyebabkan varian dari penerapan *corporate governance* pada perusahaan, penelitian ini memasukkan variabel ukuran perusahaan. Beberapa penelitian terdahulu membuktikan adanya pengaruh dari keduanya dalam penerapan *corporate governance*.

Menurut Klapper dan Love (2003) dalam Darmawati (2006) pengaruh ukuran perusahaan terhadap kualitas *corporate governance* masih bersifat ambigu. Ada dua pendapat terkait ukuran perusahaan yang dijelaskan oleh Klapper dan Love (2003) dalam Darmawati (2006). Pendapat pertama menyatakan jika perusahaan besar akan memungkinkan memiliki masalah keagenan (*agency problem*) yang lebih banyak pula, sehingga membutuhkan mekanisme *governance* yang lebih ketat. Pendapat lainnya menyatakan bahwa perusahaan yang berukuran kecil kemungkinan akan mempunyai kesempatan tumbuh yang lebih baik, sehingga akan membutuhkan dana eksternal yang banyak. Kebutuhan yang besar akan dana eksternal akan meningkatkan mekanisme *corporate governance*. Darmawati (2006) menemukan hubungan positif antara ukuran perusahaan dengan kualitas *corporate governance*. Berdasarkan uraian tersebut, maka dirumuskan hipotesis:

H₅: Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kualitas *corporate governance* perusahaan

6. Jenis Industri Bank dan Non Bank dan kualitas *Corporate Governance*

Implementasi *good corporate governance* dalam sektor perbankan menjadi masalah serius yang harus ditangani. Sejak krisis keuangan yang melanda Indonesia tahun 1997-1998 yang menyebabkan krisis perbankan terparah dalam sejarah perbankan yang berakibat lumpuhnya sendi perekonomian, terjadi penurunan kinerja perbankan secara nasional (Dewayanto, 2010).

Melihat kondisi tersebut, Pemerintah melaksanakan kebijakan reformasi perbankan pada Maret 1999 dengan melakukan penutupan bank. Tidak berhenti sampai disitu, untuk menunjukkan keseriusannya terhadap isu *corporate governance*, pada tanggal 30 Januari 2006 Bank Indonesia (BI) mengeluarkan paket kebijakan perbankan yang lebih dikenal dengan istilah Pakjan 2006, yang isinya mengenai peraturan baru tentang pelaksanaan *good corporate governance*, bagi bank umum berupa Peraturan Perbankan Indonesia (PBI) Nomor 8/4/PBI/2006 yang kemudian diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 (Dewayanto, 2010).

Dewayanto (2010) menemukan bahwa *corporate governance* yang di proksikan dengan mekanisme pemantauan kepemilikan yang terdiri dari kepemilikan pemegang saham pengendali dan kepemilikan asing, dan kepemilikan pemerintah, menunjukkan hubungan yang tidak signifikan terhadap kinerja perbankan, sedangkan mekanisme pemantauan pengendalian internal yang terdiri dari ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris, dan komisaris independen, juga menunjukkan hubungan yang negatif signifikan terhadap kinerja perbankan kecuali ukuran dewan direksi

yang menunjukkan hubungan yang positif tetapi tidak signifikan. Penelitian ini konsisten dengan yang dilakukan oleh Darmawati (2006) bahwa jenis perusahaan Bank dan Non Bank tidak berpengaruh terhadap kualitas *corporate governance*.

Penelitian yang dilakukan oleh Wati (2013) menemukan bahwa Praktik *Good Corporate Governance* (CGPI) berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan yang diukur dengan ROE dan NPM pada perusahaan yang terdaftar di BEI yang masuk dalam daftar pemeringkatan oleh *The Indonesia Institute for Corporate Governance* (IICG). Berdasarkan uraian tersebut, maka dirumuskan hipotesis:

H₆: Jenis industri perbankan memiliki kualitas *corporate governance* yang lebih bagus

7. Kategori perusahaan BUMN dan Non BUMN dan Kualitas *Corporate Governance*

Perkembangan dan penerapan konsep *corporate governance* dan *good corporate governance* di Indonesia tidak terlepas dari perkembangan yang terjadi di dunia internasional. Melihat perkembangan internasional, dan juga tuntutan-tuntutan di dalam negeri sendiri akan adanya *corporate governance* berdasarkan prinsip-prinsip dan praktik-praktik yang diterima secara internasional (*international best practice*), maka di Indonesia muncul berbagai upaya untuk memenuhi tuntutan tersebut. Misalnya pada tahun 1999 dibentuk suatu Komite Nasional tentang kebijakan *corporate governance* yang disebut dengan *National Committee on Corporate Governance* (NCCG) (Jubaedah, 2007).

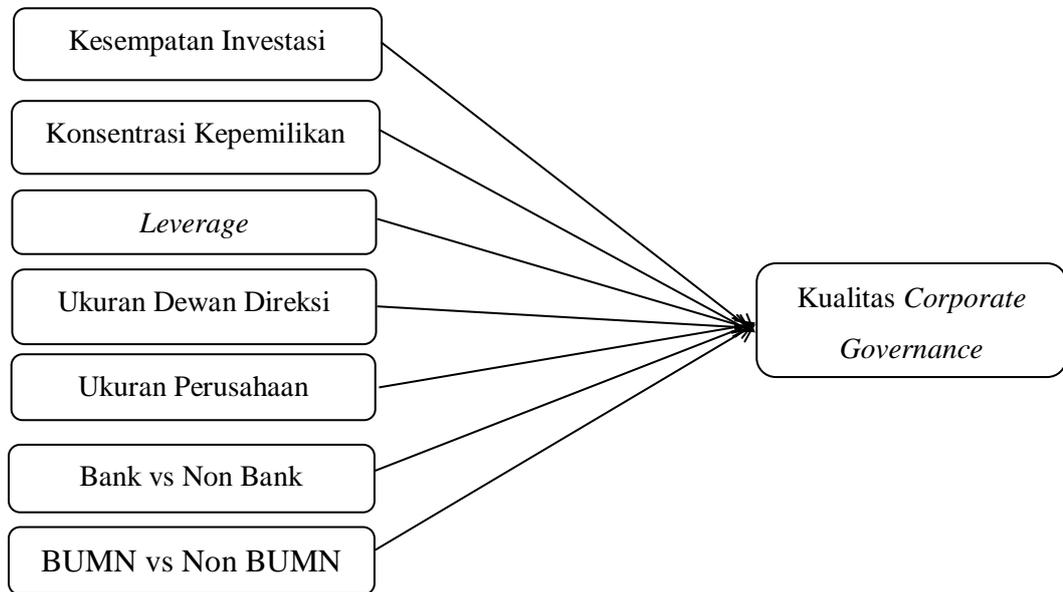
Pada tahun 2000 diterbitkan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pengembangan Praktik *Good Corporate Governance* dalam Perusahaan Perseroan. Keputusan tersebut kemudian disempurnakan melalui Keputusan Menteri BUMN No. 117 tentang penerapan Praktik *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Upaya lainnya adalah diundang-undangkannya UU BUMN Nomor 19 Tahun 2003 dan penerbitan Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-202/M.BUMN/2003 tentang Pembentukan Tim Restrukturisasi, Privatisasi dan *Corporate Governance* yang tugas pokoknya melakukan monitoring terhadap pelaksanaan GCG (Jubaedah, 2007).

Pratolo (2007) menemukan tidak ada perbedaan tingkat Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* dan Kinerja BUMN berdasarkan jenis perusahaan menunjukkan adanya regulasi yang seragam untuk BUMN mengenai Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* dan Kinerja BUMN yaitu kebijakan di bawah kementerian BUMN.

Penelitian ini tidak konsisten dengan yang dilakukan oleh Darmawati (2006) bahwa jenis perusahaan BUMN dan Non BUMN memiliki pengaruh negatif terhadap kualitas *corporate governance*. Berdasarkan uraian tersebut, maka dirumuskan hipotesis:

H₇ : Kategori perusahaan BUMN memiliki kualitas *corporate governance* yang lebih bagus

Model penelitian tampak pada gambar 1.



GAMBAR 1
Model Penelitian

G. METODE PENELITIAN

1. Objek/Subjek Penelitian

Sampel penelitian yang digunakan adalah perusahaan yang masuk dalam pemeringkatan IICG (*The Indonesian Institute of Corporate Governance*) tahun 2010-2014 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

2. Jenis Data dan Teknik Pengambilan Sampel

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari IICG dan pojok BEI Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2010-2014. Pemilihan sampel menggunakan metode *purposive sampling* dengan kriteria a) Perusahaan yang masuk dalam pemeringkatan penerapan *corporate governance* yang dilakukan oleh CGPI yang telah terdaftar di BEI tahun 2010 sampai tahun 2014; dan b) Perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan dan menggunakan satuan Rupiah dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014.

3. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Variabel Dependen

Variabel dependen dari penelitian ini adalah kualitas *corporate governance*. Kualitas *corporate governance* ini diukur dengan menggunakan instrument pemeringkatan yang dikembangkan oleh IICG (2003). Instrument yang dikembangkan ini menghasilkan suatu konstruk

yang disebut *corporate governance perception index* (CGPI). CGPI ini mengukur sejauh mana perusahaan memenuhi kaidah-kaidah implementasi *good corporate governance* (Darmawanti, 2006).

Sebelum digunakan, instrument terlebih dahulu diuji validitas dan reliabilitasnya. Pengujian validitas instrument menggunakan analisis faktor. Dalam penelitian ini, digunakan *loading factor* minimal 0,50 sebagai batas untuk mencapai tingkat signifikansi yang dibutuhkan (Darmawati, 2006).

Pengujian reliabilitas instrument dilakukan dengan menghitung koefisien *Cronbach Alpha*. Komponen/variabel pengukuran *corporate governance* memiliki nilai *Cronbach Alpha* lebih besar dari nilai minimal (0,70). Komponen-komponen yang dikembangkan oleh IICG (2003) adalah (a) Komitmen terhadap *corporate governance*, (b) Hak pemegang saham, (c) Tata kelola dewan komisaris, (d) Komite-komite fungsional (yang membantu tata kelola dewan komisaris), (e) Peranan direksi, (f) Transparansi, dan (g) Hubungan dengan *stakeholder* (Darmawati, 2006).

Masing-masing item pertanyaan memiliki skala dari 0 (Skala yang paling rendah kualitas *corporate governance*) sampai dengan 100 (skala paling tinggi kualitas *corporate governance*).

Variabel Independen

- a. Kesempatan investasi/pertumbuhan (*growth/investment oppourtunities*). Kesempatan invetasi/pertumbuhan diukur dengan menggunakan rata-rata pertumbuhan penjualan (Durnev dan Kim

(2003); Black *et al.* (2003); Bushman *et al.* (2003); Klapper dan Love (2003) dalam Darmawati, 2006). Penelitian ini menggunakan rata-rata pertumbuhan penjualan selama lima tahun.

- b. Konsentrasi kepemilikan diukur dengan persentase kepemilikan terbesar (Black *et al.* (2003); Barucci dan Falini (2004); Drobetz *et al.* (2004) dalam Darmawati, 2006).
- c. *Leverage* diukur dengan membagi total utang dengan total aset (Black *et al.*, 2003 dalam Darmawati, 2006).

$$Leverage = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Aset}}$$

- d. Ukuran dewan direksi diukur dengan menjumlahkan banyaknya anggota dewan direksi yang dimiliki perusahaan (Beiner *et al.*, 2003).
- e. Ukuran perusahaan diukur dengan menggunakan logaritma natural (LN) dari total aset (Gillan *et al.* (2003); Black *et al.* (2003); Barucci dan Falini (2004); Drobetz *et al.* (2004) dalam Darmawati 2006).
- f. Faktor regulasi diukur dengan menggunakan variabel *dummy*, dengan angka 1 untuk perusahaan yang masuk dalam industri perbankan dan angka 0 untuk perusahaan yang tidak masuk dalam industri perbankan maupun BUMN (Darmawati, 2006).

4. Uji Kualitas Data

Pengujian asumsi klasik digunakan untuk menguji apakah persamaan regresi yang telah ditentukan merupakan persamaan yang

dapat menghasilkan estimasi yang tidak bias. Uji asumsi klasik ini terdiri dari:

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi dalam penelitian ini berdistribusi normal atau tidak. Menurut Ghozali (2006) dalam Trisanti (2012) Pengambilan keputusan untuk uji normalitas adalah:

- 1) Apabila data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti alur garis histogramnya itu menunjukkan pola distribusi yang normal, dan nilai sig pada tabel *Kolmogorov-smirnov* nya $> 0,05$ maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- 2) Apabila data tidak menyebar disekitar garis diagonal dan tidak mengikuti alur garis histogramnya itu menunjukkan pola distribusi yang tidak normal, dan jika pada tabel *Kolmogorov-smirnov* nilai sig nya kurang dari 0,05 maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas

b. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas adalah suatu kondisi yang menunjukkan terdapat satu atau lebih variabel independen yang berkorelasi dengan variabel independen lainnya. Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ada korelasi antar variabel Independen (bebas). Model regresi dikatakan baik apabila tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Adanya

multikolonieritas dapat dilihat dari *tolerance value* atau nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor (VIF)*. Batas dari nilai *tolerance* adalah 0,10 dan batas VIF adalah 10. Apabila nilai *tolerance* dibawah 0,10 atau nilai VIF diatas 10 maka terjadi multikolinearitas (Rahayuningsih, 2013).

c. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear dapat berkorelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya (t-1). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada *problem* autokorelasi (Rahayuningsih, 2013). Uji autokorelasi ini menggunakan teori Singgih (2001) dengan kriteria autokorelasi ada 3, yaitu:

- 1) Jika nilai D-W di bawah -2 berarti diindikasikan ada autokorelasi positif.
- 2) Jika nilai D-W di antara -2 sampai 2 berarti diindikasikan tidak ada autokorelasi.
- 3) Jika nilai D-W di atas 2 berarti diindikasikan ada autokorelasi negatif.

d. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas yaitu suatu pengujian untuk melihat apakah data mempunyai varian yang sama (*homogen*) atau data

mempunyai varian yang tidak sama (*heterogen*). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas digunakan metode *Glejster*. Jika nilai signifikan (sig) $>$ α (alpha) maka tidak ada masalah heteroskedastisitas. Data yang baik adalah data yang homogen (Rahayuningsih, 2013).

5. Uji Hipotesis dan Analisis Data

a. Metode Regresi

Alat analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian ini adalah regresi berganda. Model penelitian adalah:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 KI + \beta_2 KK + \beta_3 LEV + \beta_4 UDD + \beta_5 SIZE + \beta_6 BANK + \beta_7 BUMN + \varepsilon$$

Dimana:

Y = Kualitas *corporate governance* (CGPI)

A = Konstanta (tetap)

$\beta_1 - \beta_6$ = Koefisien variabel regresi

KI = Kesempatan Investasi

KK = Konsentrasi Kepemilikan

LEV = *Leverage*

UDD = Ukuran Dewan Direksi

SIZE = Ukuran Perusahaan

BANK = Jenis industri Bank dan non Bank

BUMN = Kategori BUMN dan non BUMN

b. Uji Nilai T (Uji Parsial)

Uji Nilai T dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel independen dikatakan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen jika nilai Sig (P Value) < alpha. Dalam penelitian ini alpha yang digunakan adalah 5%.

c. Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Uji koefisien determinasi (*adjusted R²*) digunakan untuk melihat kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi perubahan variabel dependen. Untuk menginterpretasikannya terlebih dahulu harus mengubah nilai *adjusted R²* dalam bentuk persentase.

H. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Objek Penelitian

Hasil pemilihan sampel pada perusahaan yang masuk dalam pemeringkatan IICG yang terdaftar di BEI periode tahun 2010-2014 diperoleh jumlah sampel sebanyak 78 perusahaan. Proses pemilihan sampel dalam penelitian disajikan pada Tabel 2.

TABEL 2
PROSES PENGAMBILAN SAMPEL

Keterangan	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Total
Perusahaan yang mengikuti CGPI	33	40	42	31	24	170
Perusahaan yang tidak terdaftar di BEI tahun 2010-2014	(12)	(20)	(16)	(16)	(10)	(78)
Perusahaan yang tidak mempublikasikan laporan keuangan auditan per 31 Desember dari tahun 2010-2014	(2)	(2)	(6)	(1)	(2)	(14)
Perusahaan yang tidak menggunakan mata uang Rupiah sebagai mata uang pelaporan	(2)	(1)	(1)	(1)	(0)	(5)
Jumlah perusahaan yang dijadikan sampel	17	17	19	13	12	78

2. Analisis Deskriptif

Statistik deskriptif variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian tampak pada Tabel 3:

TABEL 3
STATISTIK DESKRIPTIF

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviasi
Y	78	66.44	92.88	83.3296	6.35507
KI	78	-0.2643858	0.9666140	0.1853781811	0.2379089513
KK	78	0.0000	0.9692	0.638578	0.1704408
LEV	78	0.0220120	0.9178465	0.581678759	0.2736940782
UDD	78	3.00	11.00	7.0513	2.45953
SIZE	78	1.729.840.278.000	855.039.673.000.000	145.375.603.078.331	3.91216
BANK	78	0.00	1.00	0.4103	0.49506
BUMN	78	0.00	1.00	0.6026	0.49254

Sumber: Hasil analisis data

Tabel 3 menunjukkan kualitas implementasi *corporate governance* (Y) pada perusahaan yang *listing* di BEI periode tahun 2010 sampai 2014 adalah nilai minimum skor perusahaan 66,44, nilai maksimum skor perusahaan 92,88 dengan rata-rata skor CGPI perusahaan 83,3296. Kesempatan investasi (KI) yang dihitung dengan rata-rata pertumbuhan penjualan/pendapatan memiliki nilai minimum -0,2643858%, dan nilai maksimum sebesar 0,9666140%, serta rata-rata pertumbuhan penjualan/pendapatan perusahaan yang diperoleh sebesar 0,1853781811%. Konsentrasi kepemilikan (KK) yang dihitung dengan presentase kepemilikan

saham perusahaan terbesar memiliki nilai minimum 0,0000% dan nilai maksimum kepemilikan sebesar 96,92%, serta rata-rata kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh para pemegang saham yakni sebesar 0,638578 atau 63,86%. *Leverage* memiliki nilai minimum sebesar Rp. 0,0220120, dan nilai maksimal Rp. 0,9178465 serta memiliki rata-rata aset yang dibelanjahi oleh hutang sebesar Rp. 0,581678759. Ukuran dewan direksi (UDD) perusahaan maksimum memiliki 3 orang direksi dan yang tertinggi memiliki 11 orang dewan direksi dalam perusahaan dengan rata-rata sebesar 7 orang direksi di setiap perusahaan. Ukuran perusahaan (SIZE) yang dihitung dengan LN total aset memiliki minimum atau total asset terkecil yaitu PT. Metropolitan Land Tbk ditahun 2011 sebesar Rp. 1.729.840.278.000, dan maksimum total aset atau kepemilikan total aset terbesar dimiliki PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk tahun 2014 sebesar Rp. 855.039.673.000.000, perusahaan rata-rata memiliki total aset sebesar Rp. 145.375.603.078.331. Jenis industri yang termasuk Bank dan Non Bank (BANK) dalam penelitian ini memiliki nilai minimum sebesar 0,00 yang artinya, 0 untuk kategori yang Non Bank, sedangkan nilai maksimum sebesar 1,00 yang artinya, 1 adalah untuk kategori Bank, serta jenis industri Bank dan Non Bank yang masuk dalam penelitian ini rata-rata sebesar 0,4103 perusahaan yang sudah termasuk perusahaan Bank maupun Non Bank. Jenis Kategori perusahaan BUMN dan Non BUMN (BUMN) dalam penelitian ini memiliki nilai minimum 0,00 yang artinya 0 untuk kategori perusahaan yang Non BUMN, sedangkan nilai maksimum sebesar 1,00 yang artinya, 1 adalah untuk kategori

perusahaan BUMN, serta kategori perusahaan yang ikut atau masuk dalam penelitian ini rata-rata sebesar 0,6026 perusahaan yang sudah termasuk perusahaan BUMN maupun Non BUMN.

3. Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik dalam penelitian ini dimaksudkan agar model regresi yang diperoleh menghasilkan estimator linier tidak bias yang terbaik.

Nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* yang diperoleh sebesar $0,809 > 0,05$, ini menunjukkan bahwa data berdistribusi normal.

Hasil uji multikoleniaritas memperlihatkan tidak ada satupun variabel independen yang memiliki nilai *tolerance* kurang dari 0,1. Nilai *variance inflation factor* (VIF) pada masing-masing variabel independen tidak ada yang lebih dari 0,10. Jadi dapat disimpulkan model regresi tidak terjadi multikolinearitas. Hasil uji autokorelasi menggunakan uji Durbin Watson menunjukkan nilai DW yang diperoleh sebesar 1,672; berada pada daerah -2 sampai 2, artinya tidak ada autokorelasi dalam model regresi. Hasil uji heteroskedastisitas menggunakan uji Glejser menunjukkan tidak ada satupun variabel independen yang mengalami masalah heteroskedastisitas Karena nilai sig. $t > 0,05$.

4. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda untuk menguji pengaruh kesempatan investasi (KI),

konsentrasi kepemilikan (KK), *Leverage* (LEV), ukuran perusahaan (SIZE), kategori Bank dan Non Bank (BANK), kategori BUMN dan Non BUMN (BUMN) terhadap kualitas *corporate governance* (Y). Ringkasan hasil regresi linier berganda disajikan pada Tabel 4.

TABEL 4
RINGKASAN HASIL UJI REGRESI

Variabel	Standardized Coefficients B	t-value	Prob (t-stat)	Keterangan
Konstanta		14,925	0,000	
KI	0,111	1,211	0,230	Tidak Signifikan
KK	0,176	1,919	0,059	Tidak Signifikan
LEV	-0,094	-0,995	0,323	Tidak Signifikan
UDD	0,281	2,195	0,032	Signifikan
SIZE	-0,023	-0,210	0,834	Tidak signifikan
BANK	0,306	2,284	0,025	Signifikan
BUMN	0,380	4,191	0,000	Signifikan
Adj R ²	0,449			
F-stat	8.147			
Sig	0,000			

Sumber: Hasil analisis data

Berdasarkan hasil uji regresi pada Tabel 4 diperoleh persamaan regresi:

$$CGPI = 0,111 KI + 0,176 KK + -0,094 LEV + 0,281 UDD + -0,023 SIZE + 0,306 BANK + 0,380 BUMN$$

1. Uji signifikansi nilai t (t-test)

Variabel kesempatan investasi (KI) memiliki koefisien regresi sebesar 0,111 dengan sig (*p-value*) sebesar 0,230 > α (0,05), sehingga kesempatan investasi tidak berpengaruh terhadap kualitas *corporate governance*; artinya hipotesis satu (H₁) ditolak.

Variabel konsentrasi kepemilikan (KK) memiliki koefisien regresi sebesar 0,176 dengan sig (*p-value*) sebesar 0,059 > α (0,05), sehingga

konsentrasi kepemilikan tidak berpengaruh terhadap kualitas *corporate governance*; artinya hipotesis dua (H₂) ditolak.

Variabel *leverage* (LEV) memiliki koefisien regresi sebesar -0,094 dengan *p-value* 0,323 > α (0,05), sehingga *leverage* tidak berpengaruh terhadap kualitas *corporate governance*; dengan demikian hipotesis tiga (H₃) ditolak.

Variabel ukuran dewan direksi (UDD) memiliki koefisien regresi sebesar 0,281 dengan nilai sig (*p-value*) 0,032 < α (0,05), sehingga ukuran dewan direksi berpengaruh positif terhadap kualitas *corporate governance*; dengan demikian hipotesis empat (H₄) ditolak.

Variabel ukuran perusahaan (SIZE) memiliki koefisien regresi sebesar -0,023 dengan nilai sig (*p-value*) sebesar 0,834 > α (0,05), sehingga ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap kualitas *corporate governance*; dengan demikian hipotesis lima (H₅) ditolak.

Jenis industri Bank dan Non Bank (BANK) memiliki koefisien regresi sebesar 0,306 dengan nilai sig (*p-value*) sebesar 0,025 < α (0,05), sehingga jenis industri Bank dan Non Bank berpengaruh terhadap kualitas *corporate governance*; dengan demikian hipotesis enam (H₆) diterima.

Kategori perusahaan BUMN dan Non BUMN (BUMN) memiliki koefisien regresi sebesar 0,380 dengan nilai sig (*p-value*) sebesar 0,000 < α (0,05), sehingga kategori perusahaan BUMN dan Non BUMN berpengaruh terhadap kualitas *corporate governance*. Hipotesis ketujuh (H₇) diterima.

2. Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Nilai *adjusted R²* sebesar 0,394 yang menunjukkan bahwa 39,4% variasi kualitas *corporate governance* dapat dijelaskan oleh variabel-variabel kesempatan investasi, konsentrasi kepemilikan, *leverage*, ukuran dewan direksi, ukuran perusahaan, jenis industri Bank dan Non Bank, kategori perusahaan BUMN dan Non BUMN, sedangkan sisanya sebesar 60,6% dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian.

I. Pembahasan

1. Kesempatan investasi dan kualitas *corporate governance*

Hasil pengujian hipotesis satu menunjukkan bahwa kesempatan investasi tidak berpengaruh terhadap kualitas *corporate governance*. Perusahaan yang memiliki kesempatan investasi yang rendah tidak akan terlalu ambil pusing memikirkan untuk mendapatkan dana eksternal yang lebih sehingga kurang memperhatikan kualitas *corporate governance* perusahaannya.

Hasil penelitian ini konsisten dengan Darmawati (2006) yang menunjukkan bahwa kesempatan investasi tidak berpengaruh terhadap kualitas *corporate governance*. Demikian juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahayuningsih (2013) dan Taman dan Nugroho (2011) yang menemukan bahwa kesempatan investasi tidak berpengaruh terhadap kualitas *corporate governance*.

2. Konsentrasi kepemilikan dan kualitas *corporate governance*

Hasil pengujian hipotesis dua menunjukkan bahwa konsentrasi kepemilikan tidak berpengaruh terhadap kualitas *corporate governance*. Semakin terkonsentrasinya kepemilikan, maka pemegang saham mayoritas akan semakin menguasai perusahaan dan semakin mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Selain itu, pemegang saham mayoritas akan berpandangan bahwa bukan menjadi kepentingannya lagi mengenai perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dan mekanisme *corporate governance*. Karena hal ini mengindikasikan bahwa kualitas implementasi *corporate governance* yang baik akan diabaikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa konsentrasi kepemilikan tidak memengaruhi kualitas *corporate governance* perusahaan.

Hasil penelitian ini konsisten dengan yang dilakukan oleh Rahayuningsih (2013) dan Taman dan Nugroho (2011) yang menunjukkan bahwa konsentrasi kepemilikan tidak berpengaruh terhadap kualitas *corporate governance*, namun tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Darmawati (2006) yang menemukan adanya hubungan positif antara konsentrasi kepemilikan terhadap kualitas *corporate governance*.

3. *Leverage dan kualitas corporate governance*

Pengujian hipotesis tiga menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap kualitas *corporate governance*. Hal ini berarti bahwa *leverage* secara statistik perusahaan yang memiliki tingkat utang yang tinggi dalam struktur modalnya akan cenderung menjadi subjek untuk dikenai pengawasan oleh kreditor secara ketat yang biasanya dinyatakan dalam bentuk kontrak utang, dengan demikian perusahaan kurang begitu mementingkan kualitas *good corporate governance*.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Darmawati (2006) dan Rahayuningsih (2013) yang menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap kualitas *corporate governance*. Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan hasil penelitian Taman dan Nugroho (2011) dan Evana *et al.* (2007), yang menemukan hubungan positif antara *leverage* dengan kualitas *corporate governance*.

4. *Ukuran dewan direksi dan kualitas corporate governance*

Pengujian hipotesis empat menunjukkan bahwa ukuran dewan direksi berpengaruh terhadap kualitas *corporate governance* dan memiliki arah yang positif. Semakin besar dewan direksi maka akan semakin baik dalam hal pengawasan perusahaan, karena salah satu fungsi direksi yaitu harus menyusun dan melaksanakan sistem pengendalian internal perusahaan yang handal dalam rangka menjaga kekayaan dan kinerja perusahaan yang memenuhi peraturan perundang-undangan dan menyusun

pertanggungjawaban pengelolaan perusahaan dalam bentuk laporan tahunan dan laporan pelaksanaan GCG.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Wulandari (2006) yang menunjukkan hasil bahwa ukuran dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan namun tidak signifikan.

5. Ukuran perusahaan dan kualitas *corporate governance*

Pengujian hipotesis lima menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap kualitas *corporate governance*. Semakin besar suatu perusahaan akan semakin banyak permasalahan yang dihadapi sehingga akan kurang memperhatikan kualitas *corporate governance*nya.

Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Rahayuningsih (2013) dan Darmawati (2006) yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap kualitas *corporate governance*. Namun berbanding terbalik dengan yang dilakukan oleh Isditanadevi dan Puspaningsih (2014) yang menemukan hubungan yang positif antara ukuran perusahaan terhadap kualitas *corporate governance*.

6. Jenis industri Bank dan Non Bank dan kualitas *corporate governance*

Pengujian hipotesis enam menunjukkan bahwa jenis industri Bank dan Non Bank memiliki pengaruh terhadap kualitas *corporate governance*. Hal ini dikarenakan industri Bank dan Non Bank memiliki

regulasi yang ketat yang memungkinkan jenis industri ini menerapkan *corporate governance* yang baik.

Hasil penelitian ini konsisten dengan yang dilakukan oleh Rahayuningsih (2013) yang menunjukkan bahwa jenis industri Bank dan Non Bank berpengaruh terhadap kualitas *corporate governance*. Namun penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Darmawati (2006) yang menunjukkan bahwa jenis industri Bank dan Non Bank tidak memengaruhi kualitas *corporate governance*.

Peningkatan kualitas pelaksanaan *Good Corporate Governance* perlu dilaksanakan karena risiko dan tantangan yang dihadapi Bank baik dari intern maupun ekstern semakin banyak dan kompleks. Secara internal, dewan Komisaris dan Direksi diharapkan mampu bertindak sebagai panutan (*role model*) dan motor penggerak agar Bank secara keseluruhan menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* secara optimal. Struktur dewan Komisaris dan Direksi terdiri dari pihak-pihak independen serta pihak-pihak yang terafiliasi dengan pemegang saham pengendali Bank. Keberadaan dua pihak tersebut, diharapkan dapat meningkatkan *check and balance* dan pada akhirnya dapat mengoptimalkan pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bank.

Selaku Komisaris Independen dan Pihak Independen, anggota komite harus dapat terlepas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*), untuk mencegah adanya benturan kepentingan (*conflict of interest*) tersebut, maka bagi mantan pengurus serta pihak-pihak lain yang

mempunyai hubungan dengan Bank dinilai perlu menjalani masa tunggu (*cooling off*) sebelum menjabat sebagai Komisaris Independen atau Pihak Independen anggota komite.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bank, pemegang saham Bank dapat menunjuk wakil untuk duduk sebagai anggota dewan komisaris atau direksi guna menjalankan tugas pengawasan terhadap Bank dan kelompok usaha Bank yang tidak melakukan kegiatan usaha Bank (Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006).

a. Kerangka regulasi dari sektor perbankan, yaitu:

- 1) Regulasi tentang perbankan di Indonesia dilakukan lewat penetapan UU tentang perbankan.
- 2) Tujuan: untuk melindungi industri perbankan dalam menghadapi risiko, yang pada akhirnya juga berarti melindungi nasabah dan perekonomian dari kegagalan proses dan prosedur yang dapat berdampak pada sistem keuangan secara keseluruhan.
- 3) Undang-undang tentang perbankan:
 - a) UU RI No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 10 Tahun 1998.
 - b) UU RI No. 23 Tahun 1999 tentang BI sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 3 Tahun 2004.

b. Kebutuhan Regulasi Perbankan

Beberapa pertimbangan mengapa perlu diperlukan regulasi bagi perbankan:

- 1) Rasio hutang dengan modal (*leverage*)
- 2) Modal (*capital*)
- 3) *Insolvency*
- 4) Peranan Bank Sentral sebagai *lender of the last resort*
- 5) Stabilitas keuangan
- 6) Stabilitas moneter
- 7) Liberasi keuangan internasional
- 8) Persaingan antar bank dan inovasi produk keuangan

c. Good Corporate Governance

- 1) *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan suatu tata kelola yang didasarkan pada prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggung jawaban, independensi dan kewajaran ~~terkait~~ dengan hubungan antara dewan komisaris, dewan direktur eksekutif, *stakeholder* dan para pemegang saham.
- 2) Manfaat GCG: menciptakan struktur yang membantu bank dalam:
 - a) Menetapkan tujuan
 - b) Menjalankan operasi harian

- c) Mempertimbangkan kepentingan *stakeholder* dengan beroperasi secara sehat dan baik
- d) Menyesuaikan dengan hukum dan aturan yang berlaku
- e) Memproteksi kepentingan nasabah kreditur

d. ***Good Corporate Governance (GCG) pada perbankan***

Implementasi *Good Corporate Governance (GCG)* pada perbankan dapat dilakukan melalui:

- 1) Penetapan tujuan dan nilai-nilai perusahaan
- 2) Lini tanggung jawab dan akuntabilitas yang jelas
- 3) Tanggung jawab dewan direksi
- 4) Pengawasan manajer senior
- 5) Peranan auditor internal dan eksternal
- 6) Kebijakan kompensasi
- 7) Transparansi

e. **Kebijakan Pengaturan GCG oleh Bank Indonesia**

Agenda BI memperkuat GCG pada perbankan di Indonesia terdiri dari:

- 1) Struktur tata kelola (*governance structure*)
 - a) Uji kemampuan dan kepatutan: PBI No. 5/25/PBI/2003
 - b) Indenpendensi pengurus Bank: PBI No. 2/27/PBI/2000

- c) Direktur kepatuhan dan peningkatan fungsi audit: PBI No. 1/6/PBI/1999
- 2) Proses tata kelola (*governance procces*)
 - a) Manajemen risiko dan pengendalian internal: PBI No. 5/8/PBI/2003
 - b) Strategi dan rencana bisnis bank: PBI No. 2/27/PBI/2000
 - c) Manajemen tingkat kesehatan bank: PNI No. 6/10/PBI/2004
- 3) Hasil tata kelola (*governance outcome*)
 - a) Transparansi kondisi keuangan bank: PBI No. 3/22/PBI/2001
 - b) Transparansi langkah pengawasan BI: PBI No. 3/25/PBI/2001

7. Kategori perusahaan BUMN dan Non BUMN dan kualitas *corporate governance*

Pengujian hipotesis tujuh menunjukkan bahwa kategori perusahaan BUMN dan Non BUMN berpengaruh terhadap kualitas *corporate governance*. BUMN wajib menerapkan GCG secara konsisten dan keberlanjutan dengan berpedoman pada peraturan menteri dengan tetap memperhatikan ketentuan, norma yang berlaku serta anggaran dasar BUMN. Karena dengan BUMN mempunyai kualitas *corporate governance* yang bagus akan mengoptimalkan nilai BUMN agar

perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional, sehingga akan mampu mempertahankan keberadaannya dan hidup berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan (Peraturan Menteri Negara BUMN No: PER – 01/MBU/2011).

Hasil penelitian ini konsisten dengan yang dilakukan oleh Darmawati (2006) yang menemukan bahwa kategori perusahaan BUMN dan Non BUMN berpengaruh terhadap kualitas *corporate governance*. Hasil ini bertolak belakang dengan yang dilakukan oleh Rahayuningsih (2013) yang menemukan kategori perusahaan BUMN dan Non BUMN tidak berpengaruh terhadap kualitas *corporate governance*.

J. SIMPULAN, SARAN, KETERBATASAN PENELITIAN

1. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

- a. Kesempatan investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas *corporate governance*.
- b. Konsentrasi kepemilikan tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas *corporate governance*.
- c. *Leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas *corporate governance*.
- d. Ukuran dewan direksi berpengaruh positif terhadap kualitas *corporate governance*.
- e. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas *corporate governance*.
- f. Jenis industri Bank dan non Bank berpengaruh terhadap kualitas *corporate governance*.
- g. Kategori BUMN dan non BUMN berpengaruh terhadap kualitas *corporate governance*.

2. Keterbatasan

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah sampel hanya menggunakan perusahaan yang masuk dalam peringkat CGPI yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sehingga tidak dapat digeneralisir dan kurang mewakili perusahaan yang masuk dalam peringkat CGPI.

3. Saran

Berdasarkan simpulan dan keterbatasan tersebut maka diberikan saran sebagai berikut:

- a. Penelitian yang akan datang diharapkan dapat memperpanjang periode pengamatan.
- b. Sampel penelitian hendaknya diperuas dengan mengikutsertakan seluruh perusahaan yang mengikuti CGPI.

DAFTAR PUSTAKA

- Achyani, F. (2016). "Determinan dan Peran Kualitas *Corporate Governance* dalam Hubungan antara Struktur Kepemilikan dan Karakteristik Perusahaan dengan Kinerja Perusahaan", Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Barucci, E., & Falini, J. (2004). Determinants of Corporate Governance in Italy. *Economic Notes*.
- Beiner, S., W. Drobetz, F. Schmid dan H. Zimmermann. (2003). "Is Board Size An Independent Corporate Governance Mechanism?". <http://www.wvz.unibas.ch/cofi/publications/papers/2003/06.03.pdf>.
- Black, B. S., Jang, H., & Kim, W. (2006). "Predicting Firms' Corporate Governance Choices: Evidence From Korea". *Journal Of Corporate Finance*, Vol. 12, No. 3 660-691
- Darmawati, D. (2006). "Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Faktor Regulasi terhadap Kualitas Implementasi *Corporate Governance*". *Proceeding Simposium Nasional Akuntansi IX*, Padang 24-25.
- Dewayanto, T. (2010). Pengaruh Mekanisme *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja Perbankan Nasional. *Fokus Ekonomi*, Vol. 5, No. 2 104-123.
- Evana, E., Andriyanto, R. W., & Marbun, B. S. H. (2015). Pengaruh Kinerja Keuangan, Kepemilikan Saham Asing, Konsentrasi dan Pertumbuhan Perusahaan terhadap Kualitas Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan. *Jurnal Akuntansi & Investasi*, Vol. 8, No. 1, 17-32.
- Isditanadevi, N., & Puspaningsih, A. (2014). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Struktur Modal, Profitabilitas Dan Umur Listing terhadap Kualitas Implementasi *Good Corporate Governance*. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi* Vol. 5, No 2,
- Jubaedah, E. (2007). Pengembangan *Good Corporate Governance* dalam Rangka Reformasi Badan Usaha Milik Negara. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 4(1), 45-55.
- Klapper, L. F., & Love, I. (2004). Corporate Governance, Investor Protection, and Performance in Emerging Markets. *Journal of corporate Finance*, Vol. 10, No. 5, 703-728.
- KNKG. (2006). "Pedoman Umum *Good Corporate Governance Indonesia*" Jakarta; Komite Nasional Kebijakan *Governance*.
- Kusrinanti, M. A., & Syafruddin, M., (2012). "Pengaruh *Corporate Governance* terhadap Ketepatan Waktu *Corporate Internet Reporting* pada Perusahaan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia". *Proceeding Simposium Nasional Akuntansi XV*. 1-30.

- Kusumawati, D. N., & Bambang Riyanto, L. S. (2005). “*Corporate Governance dan Kinerja: Analisis Pengaruh Compliance Reporting dan Struktur Dewan terhadap Kinerja.*” *Proceeding Simposium Nasional Akuntansi VIII*. 15-16 September. Solo.
- Nazaruddin, I., & Basuki, A. T., (2016). *Analisis Statistik Dengan SPSS*. Yogyakarta: Danisa Media. 123
- Pramono, F. A. (2011). “Analisis Pengaruh Karakteristik Perusahaan terhadap Kualitas Pengungkapan *Corporate Governance* Pada Laporan Tahunan (Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar dalam LQ-45)”. *Doctoral Dissertation*, Universitas Diponegoro
- Pratolo, S. (2007). “*Good Corporate Governance dan Kinerja BUMN di Indonesia: Aspek Audit Manajemen dan Pengendalian Intern sebagai Variabel Eksogen serta Tinjauannya pada Jenis Perusahaan*” *Proceeding Simposium Nasional Akuntansi X*, Makasar.
- Puno, B., L & Khafid, M. (2013). Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance* terhadap Kinerja Perbankan. *Proceeding Simposium Nasional Akuntansi XVI*, 4.198
- Rahayuningsih, D. (2013). “Pengaruh Kesempatan Investasi, Konsentrasi Kepemilikan, *Leverage*, Komposisi Aktiva, Ukuran Perusahaan, Dan Faktor Regulasi terhadap Kualitas *Good Corporate Governance*”. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, Vol. 5, No. 2.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006: “Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia” Nomor 8/4/PBI/2006 “Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum”. <http://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/peraturan-bank-indonesia/Pages/peraturan-bank-indonesia-nomor-8-14-pbi-2006.aspx> (Diakses pada 9 September 2016)
- Setyani, D. A., (2012). “Pengaruh Karakteristik Perusahaan terhadap Kualitas *Good Corporate Governance* Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan *Go Publik* yang Terdaftar Di BEI)”. *Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Sulyanti, N. H., & Haryanto, A. M. (2011). “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Tingkat *Leverage*, Kesempatan Investasi dan Konsentrasi Kepemilikan terhadap Kualitas Implementasi *Good Corporate Governance* (Studi Empiris terhadap Perusahaan Publik non Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2005-2009)”. *Doctoral dissertation*, Universitas Diponegoro.
- Taman, A., & Nugroho, B. A. (2011). “Determinan Kualitas Implementasi *Corporate Governance* Pada Perusahaan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2004-2008”. *Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia*, Vol. 9, No. 1.
- Trisanti, L. L. (2012). Analisis Pengaruh Karakteristik Perusahaan terhadap Kelengkapan Pengungkapan Sukarela (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar

di Bursa Efek Indonesia Tahun 2006-2010). *Doctoral dissertation*, Fakultas Ekonomika dan Bisnis.

Wahyuni, T., & Harto, P. (2012). Analisis Pengaruh *Corporate Governance* dan Karakteristik Perusahaan terhadap Keberadaan Komite Manajemen Risiko (Studi kasus pada perusahaan yang Listing di BEI periode 2008-2010). *Diponegoro Journal of Accounting*. Vol.1, No.1, 555-566.

Wantoro, D., & Gunawan, B. (2013). "Pengaruh Mekanisme *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Perbankan". *Thesis* Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Wati, L. M. (2013). Pengaruh Praktek *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Manajemen*, 1(01).

Wignohartojo, P. (2001). *Good Corporate Governance* Implementasi Beserta Implikasi dan Masa Depan nya." *Majalah Ekonomi*. Tahun XI No. 1, 64-77.

Wulandari, N. (2006). "Pengaruh Indikator Mekanisme *Corporate Governance* terhadap Kinerja Perusahaan Publik di Indonesia." *Fokus Ekonomi*. Vol.1. No. 2, 120-136.

googleweblight.com/?lite_url=http://dataolah.blogspot.com.2012/07v-behaviorurldefaultvmlo.html?m%3D1&ei=xScnaLuJ&lc=id-ID&s=1&m=473&host=www.google.co.id&ts=1481549725&sig=AF9NedmN3T3z9Z4QCxqeIfHe5Va-VvbNjA (Diakses pada 12 Desember 2016)